

Analisis Neraca Pendidikan Tingkat SMA Kabupaten Indragiri Hilir

Oki Rasdana¹, Elvrin Septyanti², Silvia Permatasari³, Zulhafizh⁴, Tria Putri Mustika⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Jl. Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
oki.rasdana@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This study aims to look at the balance of education at the senior high school level in Indragiri Hilir Regency with all the limitations as a district that does not have natural resources like other districts in Riau. Moreover, at the high school level is the average standard of the world of work today as the beginning of a career to become an adult human being. The research method is descriptive qualitative with data collection techniques from literature studies which are analyzed using spiral data analysis techniques through purposive sampling. The results are 1) a sufficiently qualified budget 2) IPM which increased by 0.74% from the previous year 3) APK of 50.29% and APM of 69.67% still do not meet government standards 4) many teachers are fresh graduates, the status of civil servant teachers is still small to very many teachers who are not certified 5) more than 50% need minor repairs 6) 1/4 school need to increase accreditation. Based on these results, it can be concluded that education in Indragiri Hilir Regency at the high school level is still quite good.

Keywords: balance sheet, education, high school

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat neraca pendidikan di tingkat SMA se-Kabupaten Indragiri Hilir dengan segala keterbatasan sebagai kabupaten yang tidak memiliki SDA seperti kabupaten lainnya di Riau. Apalagi di tingkat SMA merupakan standar rata-rata dunia kerja saat ini sebagai awal meniti karir menjadi manusia dewasa. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur yang dianalisis dengan teknik analisis data spiral melalui *purposive sampling*. Hasilnya 1) anggaran yang cukup mumpuni 2) IPM yang meningkat 0,74% dari tahun sebelumnya 3) APK sebesar 50,29% dan APM sebesar 69,67% masih belum memenuhi standar pemerintah 4) banyaknya guru yang fresh graduate, status guru PNS yang masih sedikit sampai kepada masih sangat banyak guru yang belum tersertifikasi 5) lebih dari 50% ruang kelas perlu perbaikan ringan 6) 1/4 dari sekolah yang ada perlu peningkatan akreditasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tingkatan SMA mengalami perubahan dengan sedikit peningkatan pada tahun sebelumnya.

Kata Kunci: neraca, pendidikan, SMA

Copyright (c) 2023 Oki Rasdana, Elvrin Septyanti, Silvia Permatasari, Zulhafizh, Tria Putri Mustika

Corresponding author: Oki Rasdana

Email Address: oki.rasdana@lecturer.unri.ac.id (Jl. Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan)

Received 21 May 2023, Accepted 25 May 2023, Published 28 May 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional merupakan standar dari setiap pendidikan yang ada daerah dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut (Handayani, 2016) melalui pendidikan nasional setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, berdaya saing tinggi, dan bermartabat di tengah pergaulan internasional. Dalam hubungan ini segala upaya perlu dilakukan agar pelaksanaan pendidikan nasional dapat berhasil sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Pemerintah pusat melalui kebijakan strategis, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dalam menghimpun data pendidikan yang disebut dengan “Neraca Pendidikan”. Data besar berupa jumlah anggaran, APK dan APM, ruang kelas, guru, tendik sampai

akreditasi sekolah tersedia dalam satu data besar yang disediakan oleh pemerintah pusat yakni kemendikbud pada <https://npd.kemdikbud.go.id/> untuk mencapai mutu yang diharapkan.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan merupakan derajat keunggulan sebuah lembaga pendidikan (Amir, 2019) yang mana lembaga pendidikan itu sendiri sudah sesuai atau melebihi standar, sesuai dengan harapan pelanggan, pihak-pihak terkait dan sesuai dengan yang dijanjikan (Satria, Rachmat, Achmad Supriyanto, Agus Timan, 2019). Pendidikan yang bermutu tentunya tidak dengan sendirinya akan hadir dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus ada yang namanya penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal (Iskandar, 2017). Peneliti dalam hal ini menganalisis data pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang dirilis pada neraca pendidikan pemerintah pusat terkhusus hanya pada lulusan SMA. Karena lulusan SMA/Sederajat salah satu jenjang yang dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Provinsi Riau (Andre Rifan Darmawan, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, pada tingkat SMA di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan. Ada yang meningkat signifikan dan ada pula yang sedikit persentase peningkatannya. Kabupaten yang terletak di pesisir Riau ini mampu bersaing dengan kabupaten lainnya yang memiliki pemasukan melalui minyak dan gas bumi. Ditakdirkan berjalan tanpa pemasukan minyak dan gas bumi, Inhil tidak kalah bersaing dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan kabupaten penghasil SDA minyak lainnya. Terbukti hal tersebut di tunjukkan pada neraca pendidikan yang dirilis kemendikbud. Peneliti dalam hal ini hanya melihat perkembangan pendidikan pada tingkatan SMA saja. Selain itu, data yang tersedia pun hanya sampai 2021 yang baru bisa dirilis resmi oleh web site yang disediakan tersebut.

Menariknya tingkatan pendidikan SMA ini ialah karena merupakan wajib belajar 12 tahun yang sudah diacntumkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu, rata-rata dunia kerja saat ini membutuhkan minimal tamatan SMA untuk diterima bekerja di sebuah perusahaan atau kantor. Oleh karena itulah, peneliti bertujuan untuk melihat neraca pendidikan di tingkat SMA se-Kabupaten Indragiri Hilir dengan segala keterba

METODE

Penelitian kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2019) menjadi metode sebagai landasan untuk meneliti neraca pendidikan tingkat SMA Kabupaten Inhil. Teknik pengumpulan data berupa studi literatur (Chaedar, 2009) dengan analisis data spiral (Creswell, 2014). Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendidikan pada tingkatan SMA di Kabupaten Inhil dari <https://npd.kemdikbud.go.id/> kemudian mengklasifikasikan data yang mendukung pengambilan simpulan pada tingkatan SMA di Kabupaten Inhil, menganalisis data tersebut, dan terakhir menyimpulkan hasil dari data yang didapatkan secara terukur dan sah dalam bidang pendidikan pada tingkatan SMA di Kabupaten Inhil. Sumber data berupa data yang disajikan kemdikbud pada situs resmi pemerintah pusat. Peneliti hanya mengambil data pada tingkatan SMA saja karena

menggunakan *purposive sampling* (Kuncoro, 2004).

HASIL DAN DISKUSI

Anggaran

Kabupaten Indragiri Hilir menjadi urutan nomor 2 ditahun 2020 tertinggi di Riau sedangkan 2021 menjadi urutan ke 7. Namun jika dilihat berdasarkan persentase anggaran pendidikan di Inhil naik 0,73% dari tahun sebelumnya dengan APBD 2021: Rp2.138,79 M. Hal ini sedikit lebih kecil dari anggaran 2020 sebesar Rp2.375,39 M. Hal yang sama terjadi pada rincian anggaran untuk jenjang pendidikan pada tingkat SMA hanyalah 0,70 M lebih rendah dari Inhu merupakan tetangga sebelahnya jika dilihat dari APBD inhu yang hanya Rp1.476,67 M menganggarkan 1,00 M untuk pendidikan tingkat SMA. Hal tersebut memang agak aneh jika dipandang dari sudut pandang APBD tetapi jika dilihat dari kemampuan dan kekayaan alam Inhil lebih berani menganggarkan untuk pendidikan di tingkat SMA sebesar itu. Hal ini jika dibandingkan dengan daerah kabupaten lain dengan limpahan SDA yang melimpah dengan minyak dan gas buminya. Sementara Inhil tidak memiliki SDA minyak dan gas alam seperti kabupaten lainnya yang ada di Riau.

Peneliti juga mendapatkan data untuk anggaran pendidikan di tingkat SMA dari Program Indonesia Pintar jumlah penerima di Inhil melebihi dari anggaran yang diberikan. Anggaran 2.744 (dalam jutaan rupiah) lebih kecil jumlahnya dibandingkan jumlah penerima sebanyak 3.126 peserta. Terdapat kelebihan sebesar 382 penerima dibanding anggaran yang tersedia. Jika kita lakukan pembagian secara kasar maka masing-masing dari jumlah penerima tersebut hanya mendapatkan sekitar 0,87 saja. Hal ini pun juga terdapat di kabupaten sebelahnya seperti Inhu dengan anggaran 2.121 (dalam jutaan rupiah) dan penerima 2.433 peserta dengan kelebihan sebesar 312. Hal yang serupa juga Peneliti temukan pada kabupaten bersebelahan juga dan tidak jauh dari Inhil yaitu pelalawan dengan anggaran yang tersedia 1.726 (dalam jutaan rupiah) dan jumlah penerima 1.984 peserta dengan kelebihan 258 penerima. Data di Inhil bisa melebihi anggaran karena jumlah masyarakat miskin cukup besar dengan data yang naik turun dari data BPS 2020 sebesar 44,29 dan 2021 sebesar 44,61 serta 2022 sebesar 43,22 (ribu jiwa).

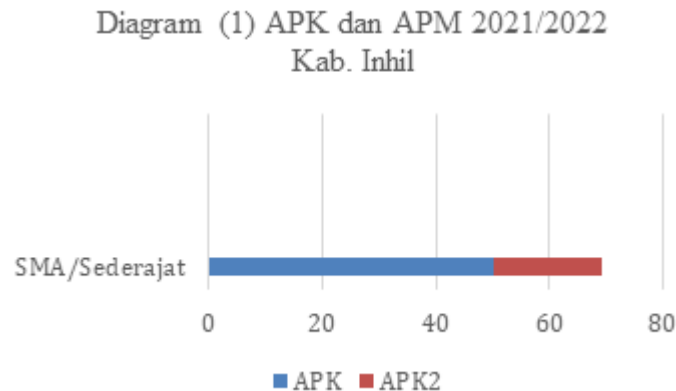
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Berdasarkan data yang didapat di BPS menunjukkan bahawa di tahun 2021 sebesar 66,63 sedangkan tahun 2022 sebesar 67,37 meningkat 0,74% dari tahun sebelumnya. Hal ini pun terjadi di tingkat nasional. IPM di Indonesia meningkat rata-rata 0,77 persen per tahun antara tahun 2010 sampai 2022. Peningkatan ini terjadi pada semua dimensi, antara lain pengetahuan, standar hidup layak, umur panjang, dan hidup sehat. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan IPM pada tahun 2022 mengalami percepatan. Semua aspek yang membentuk IPM telah berkembang, terutama rentang hidup, kehidupan yang kokoh, dan cara hidup yang baik.

Angkat Partisipasi Kasar (APK) Dan Angkat Partisipasi Murni (APM)

APK dan APM di kabupaten Inhil untuk jenjang pendidikan tingkat SMA berdasar dari UU wajib belajar 12 tahun. Hal ini pernah disampaikan oleh Komisi X DPR RI untuk mendorong

Kemendikbud Ristek berkomitmen (untuk) implementasi program prioritas nasional dan pembiayaannya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peneliti mendapatkan data untuk APK dan APM sebagai syarat memenuhi wajib belajar 12 tahun tersebut sebagai berikut:



Gambar 1 Diagram APK dan APM 2021/2022 Kab. Inhil

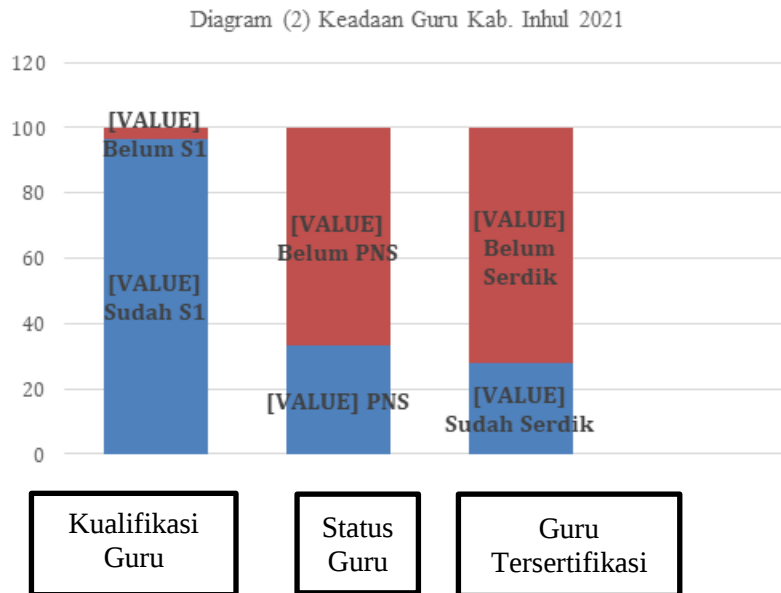
Berdasarkan hal tersebut Inhil mencapai data yang cukup memprihatinkan APK sebesar 50,29% dan APM sebesar 69,67%. Jika dilihat berdasarkan ketuntasan wajib belajar terbagi dalam empat kategori (Depdiknas, 2006).

1. Tuntas Pratama bila APK mencapai 80% - 84%
2. Tuntas Madya bila APK mencapai 85% - 89% 14
3. Tuntas Utama bila APK mencapai 90% - 94%
4. Tuntas Paripurna bila APK mencapai minimal 95%

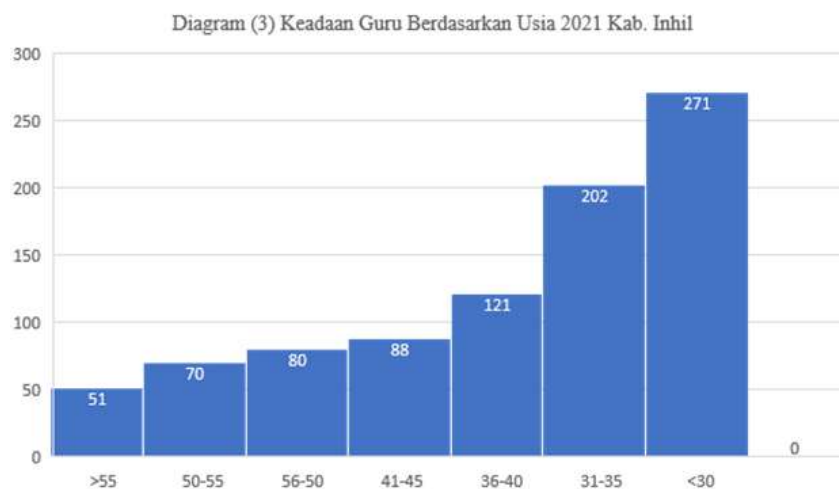
Inhil tidak mencapai standar berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, peneliti juga melihat adanya peningkatan penanganan mengenai siswa SMA yang putus sekolah ditahun 2020 sebanyak 152 orang menurun drastis di tahun 2021 sebanyak 31 orang. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam penanganan SDM di Kabupaten Inhil.

Guru

Sebagai agen pembelajaran, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kualifikasi akademik adalah jenjang pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program terakreditasi diploma empat. Hal tersebut pun sudah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang kualifikasi akademik.



Gambar 2. Diagram Rincian Keadaan Guru Kab. Inhul 2021



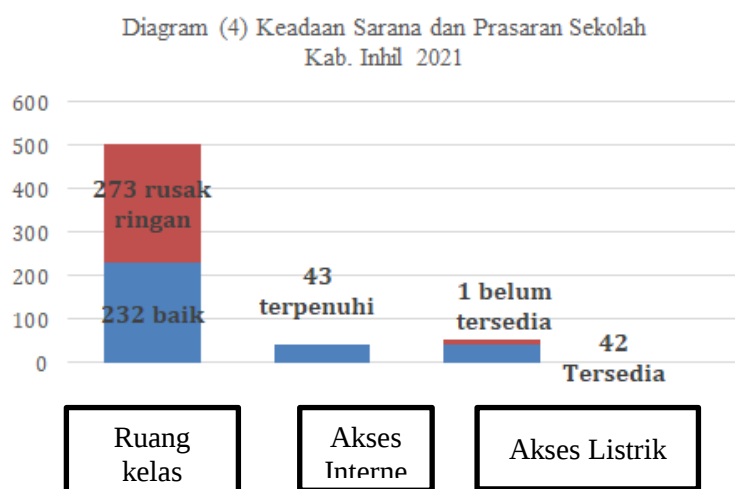
Gambar 3. Diagram Keadaan Guru Berdasarkan Usia 2021Kab Inhul

Status guru yang bukan PNS jauh lebih banyak sebesar 66,9 % sedangkan yang sudah PNS 33,1 %. Sekian banyak guru yang ada di tingkat SMA hal baiknya sebanyak 96,7% itu sudah S1 hanya tersisa 3,3% saja lagi yang masih dibawah S1. Walaupun begitu hal ini tetap harus ditangani sesuai kebutuhan sehingga bisa menambah pencapaian pendidikan di tingkat SMA. Selain itu, dari data tersebut juga didapatkan bahwa masih kurang dari 50% guru belum tersertifikasi. Ada 72,3% yang belum dan 27,7% yang telah tersertifikasi. Hal ini sedikit sangat disayangkan karena pemerintah memiliki program untuk sertifikasi guru yang gratis ditanggung negara. Hanya tinggal gurunya saja lagi bersiap diri belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sehingga bisa lulus pada program sertifikasi yang dilakukan pemerintah. Hal baiknya dari data yang sajikan ialah terdapat banyak guru muda dibawah 30 tahun yang bisa lebih kompeten, lincah, berpengetahuan baru, serta pembawa teknologi masa kini. Karena guru muda tersebut merupakan lulusan di era teknologi digital

4.0. Dengan demikian bisa memberikan zaman pendidikan baru sesuai zaman sekarang kepada peserta didik yang penuh dengan rasa keingintahuan di era teknologi digital ini.

Sarana Dan Prasarana

Infrastruktur dan fasilitas pembelajaran dapat mempercepat dan membantu pelaksanaan pendidikan. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan hasil belajar adalah ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana dan prasarana seperti media, ruang kelas, listrik, akses internet, bahan referensi bahkan toilet diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar apalagi di zaman sekarang listrik dan internet menjadi kebutuhan pokok belajar dan mengajar karena ada komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik yang bisa dilakukan secara digital baik daring maupun luring. Ada beberapa komponen dalam proses pendidikan, yang semuanya saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen ini termasuk guru yang efektif, siswa, konten, lingkungan belajar dan infrastruktur, antara lain. Berikut data yang Peneliti dapatkan untuk tingkat SMA di Kabupaten Inhil:

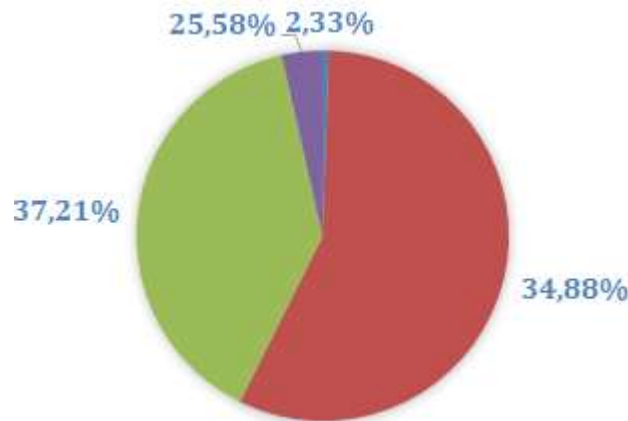


Gambar 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Kab. Inhil 2021

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa 232 ruang kelas dalam kondisi baik. Sedikit lebih kecil dari ruang kelas yang mengalami rusak ringan sebanyak 273 kelas. Artinya lebih dari 50% ruang kelas di Inhil perlu perbaikan ringan. Hal ini tentu akan sangat riskan nantinya jika tidak dilakukan penanganan segera. Karena ruang kelas yang rusak ringan ini bisa saja sewaktu-waktu membahayakan siswa, tendik dan guru. Hal baiknya ada pada keadaan listrik di seluruh SMA di Inhil sudah 100% teraliri listrik dan hanya 1 sekolah saja yang belum tersedianya akses internet.

Akreditasi Sekolah

Akreditasi dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dalam segala aspek pendidikan, baik tenaga pendidik, administrasi, guru maupun prasetasi siswa dan lain-lain. Pemberian status peringkat tersebut agar sekolah melakukan peningkatan terus-menerus lebih jauh lagi. Peningkatan yang dilakukan dengan cara pengawasan dan peninjauan yang efisien dan disesuaikan dalam aturan yang telah ditetapkan yang tujuan akhirnya menghasilkan sekolah yang lebih berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat pada data akreditasi SMA di kabupaten Inhil sebagai berikut:



Gambar 5. Diagram Akreditasi SMA Kab. Inhil

Ada 34,88% sudah terakreditasi A dengan jumlah 15 sekolah, 37,21 % terakreditasi B dengan jumlah 16 sekolah, 25,58% terakreditasi C dengan jumlah 12 sekolah serta 2,33% yaitu 1 sekolah yang belum terakreditasi. Hal ini membuat pemerintah Inhil khususnya dinas pendidikan memberikan perhatian lebih serta bantuan kepada sekolah yang masih terakreditasi C. Apalagi masih ada 1 sekolah yang belum terakreditasi sehingga bisa memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Inhil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tingkatan SMA mengalami perubahan dengan sedikit peningkatan pada tahun sebelumnya. Karena dari kriteria APK, APM, guru, sarana dan akreditasi masih perlu perhatian lebih sehingga mampu melahirkan putra-putri daerah yang berkompeten secara nasional. Bahkan peningkatan status dan kesejahteraan guru (sertifikasi) serta tendik (status PNS) perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemda terutama dinas pendidikan dalam pemenuhan capaian pendidikan yang diharapkan. Ketika “peralatan sekolah”, guru dan tendik terpenuhi diatas standar maka menciptakan pendidikan yang handal, berakhlak serta melek teknologi di era masyarakat 5.0 bukan harapan atau mimpi belaka, tetapi kenyataan yang pasti akan didapatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih pada segala pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan data penelitian. Hal ini sangat berarti sekali bagi peneliti menuliskan hasil analisis sebagai pertimbangan mengambil simpulan. Peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian ini sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak sebagai penyedia data terutama data yang dirilis pemerintah pusat dalam situs resmi kemdikbud.

REFERENSI

- Amir. (2019). Membangun Budaya Mutu Pada Lembaga Pendidikan Islam Menuju Madrasah Unggul. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.676>
- Andre Rifan Darmawan. (2022). *Pengaruh Indikator Ekonomi Makro dan Pendidikan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2020*. Universitas Pasundan.
- Chaedar, A. (2009). *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan. Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Handayani, M. (2016). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 179–201. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.766>
- Iskandar. (2017). Improving the Quality of Academic Services through Implementation of Internal Quality Assurance System in State Institute of Islamic Studies STS Jambi. *Journal of Education and Practice*, 8(3), 57–63.
- Kuncoro, M. (2004). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN.
- Satria, Rachmat, Achmad Supriyanto, Agus Timan, M. A. A. (2019). Peningkatan Mutu Sekolah melalui Manajemen Hubungan Masyarakat. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/amp.v7i2.26018>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Badan Pusat Statistik 2023 diakses pada <https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Badan Pusat Statistik 2023 diakses pada <https://inhilcab.bps.go.id/indicator/26/31/1/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik 2023 diakses pada <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1931/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2022-mencapai-72-91--meningkat-0-62-poin--0-86-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--72-29-.html>
- Badan Pusat Statistik 2023 diakses pada <https://riau.bps.go.id/indicator/28/295/1/jumlah-sekolah-sma.html>